

MAKALAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH
MENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK
BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

(AMKU112)

DOSEN PEMBIMBING

Drs. Heru Puji Winarso, M.Si



DISUSUN OLEH:

Roby Arfan Rojati

(A1B214240)

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah tentang “Kebijakan Pemerintah Menaikan Harga Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila” ini. Makalah ini memberi informasi tentang pengertian pancasila, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM berdasarkan Pancasila, alasan pemerintah menaikkan harga BBM, upaya pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin, dan dampak positif dan negatif dari kenaikan harga BBM. Disini saya masih belajar dan belajar. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang membacanya. Maaf jika masih ada banyak kesalahan dalam penulisan. Akhir kata, terima kasih kepada yang sudah membaca dan saya menerima saran dari para pembaca jika dalam makalah ini terdapat kesalahan.

Banjarmasin, 18 November 2014

Roby Arfan Rojati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Manfaat	2
BAB II ISI	3
2.1. Pengertian Pancasila	3
2.2. Kebijakan Pemerintah Menaikan Harga BBM Berdasarkan Pancasila.....	5
2.3. Alasan Pemerintah Menaikan Harga BBM.....	6
2.4. Upaya Pemerintah untuk Mengantisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM Bagi Masyarakat Miskin	8
2.5. Dampak Positif dan Negatif dari Kenaikan Harga BBM.....	9
BAB III PENUTUP	14
3.1. Kesimpulan	12
3.2. Saran	12
Daftar Pustaka	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Jokowi – JK sudah menaikkan harga BBM pada kisaran Rp 8.500/liter untuk premium dan solar pada kisaran Rp 7.500/liter. Alasan utamanya adalah untuk mengurangi beban subsidi yang dikatakan sudah sangat besar. Dalam APBN-P 2014, memang disebutkan bahwa program pengendalian subsidi telah ditetapkan sebesar Rp 403 triliun, terdiri dari atas subsidi energi Rp 350,3 triliun, yaitu subsidi BBM Rp 246,5 triliun dan subsidi listrik Rp 103,8 triliun, serta subsidi non energi Rp 52,7 triliun. Pemerintah menilai angka subsidi itu harus dikurangi mengingat besarnya subsidi itu telah mengurangi kemampuan pembiayaan kebutuhan lain yang dianggap lebih penting, misalnya anggaran untuk infrastruktur 2014 yang hanya sekitar Rp 200 triliun, atau untuk sektor kesehatan yang hanya sekitar Rp 70 triliun.

Benar bahwa secara nominal subsidi BBM naik pesat dari hanya sebesar Rp 90 triliun tahun 2005, menjadi Rp 246 triliun pada tahun 2014. Bahkan bila memasukkan energi listrik, yang di dalamnya juga ada subsidi untuk BBM, total akan mencapai Rp 350,3 triliun. Meski secara nominal subsidi terus meningkat, tapi secara prosentase, porsi subsidi BBM terhadap APBN hampir tetap.

Menurut pemerintah, dengan menaikkan BBM menjadi Rp 8.500/liter akan dihemat APBN sebesar Rp 100 trilyun. Pertanyaannya, apakah sedemikian gentingnya kondisi APBN kita sehingga subsidi harus segera dikurangi mengingat selama ini APBN tidak pernah terserap semua. Tahun 2013 saja ada sisa lebih dari Rp 20 trilyun. Jadi, dari sisa anggaran tahun 2013 itu, tambahan subsidi BBM bisa ditutupi sebagiannya.

Oleh karenanya kebijakan kenaikan harga BBM harus ditolak, karena: Pertama, ini adalah kebijakan zalim, yang pasti akan menyengsarakan rakyat sementara hasil penghematan tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh seluruh rakyat. Hasil Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS 2010) menunjukkan bahwa pengguna BBM 65% adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27% menengah, 6% menengah

ke atas, dan hanya 2% orang kaya. Dan dari total jumlah kendaraan di Indonesia yang mencapai 53,4 juta (2010), sebanyak 82% diantaranya merupakan kendaraan roda dua yang nota bene kebanyakan dimiliki oleh kelas menengah bawah. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian pancasila?
2. Apakah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sesuai dengan nilai-nilai pancasila atau tidak?
3. Apa alasan pemerintah menaikkan BBM?
4. Apa upaya pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin?
5. Apa dampak positif dan negatif dari kenaikan harga BBM?

1.3. Tujuan

Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui dampak baik dan buruk dari kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Dan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan Pancasila yang menjadi dasar negara ini.

1.4. Manfaat

Dengan dibuatnya makalah ini kita dapat mengetahui sesuai atau tidaknya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan kita juga dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut.

BAB II

ISI

2.1. Pengertian Pancasila

A. Pengertian Pancasila secara Etimologis

Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta perkataan “Pancasila” memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu “panca” artinya “lima,” “syila” vokal I pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar” dan “syiila” vokal i pendek artinya “peraturan

tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila “ yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah adalah istilah “Panca Syilla” dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.

B. Pengertian Pancasila secara Historis

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamlirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 di mana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

C. Pengertian Pancasila secara Terminologis

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstisional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

2.2. Kebijakan Pemerintah Menaikan Harga BBM Berdasarkan Pancasila

Suara rakyat tidak dipedulikan lagi. Mereka yang mendukung kenaikan BBM, telah tuli dan buta karena tidak mampu menyaksikan dan mendengar jeritan rakyat. Pengorbanan para demonstran kini hanya menjadi sebuah mimpi yang dibakar dan dicampakan. Mereka di atas sana lebih mementingkan diri sendiri dan kini tersenyum lebar di atas penderitaan rakyat. Apalah arti Pancasila.

1. *Ketuhanan yang Maha Esa.* Orang Indonesia sangat dekat dengan agama, namun prilakunya sangat menyimpang dari ajaran agama. Dalam pribahasa latin, *vox populi, vox Dei* (Suara Rakyat, suara

Tuhan). Akan tetapi, mereka di atas sana telah tuli dan buta. Suara Tuhan pun tidak dipedulikan.

2. *Kemanusiaan yang adil dan beradab*. Realitanya, pemerintah Indonesia malah berlaku tidak adil dan biadab. Rakyat dibiarkan melarat dalam kemiskinan. Keadilan yang dicita-citakan tidak pernah terwujud. Yang ada hanyalah penindasan, kekerasan, dan otoriter.
3. *Persatuan Indonesia*. Kemerdekaan Indonesia yang telah kita raih, berkat persatuan dan kesatuan. Namun yang terjadi sekarang, bersatu untuk menindas rakyatnya sendiri. Sangat disayangkan, wakil rakyat yang pro rakyat malah jadi minoritas. Indonesia tidak bersatu, tetapi terpecah belah oleh keegoan.
4. *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan*. Perwakilan rakyat tidak bijaksana dalam memilih jalan keluar yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat. Yang ada hanyalah penderitaan yang terus berkelanjutan. Sidang yang berlangsung kemarin sore hingga tadi malam hanya menghasilkan kekecewaan bagi rakyat. Meskipun banyak anggota DPR yang berusaha untuk memihak kepada rakyat dan bertindak bijaksana, namun mereka tidak dipedulikan.
5. *Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kini hanya menjadi mimpi belaka. Keadilan itu tidak pernah ada di bumi pertiwi ini. Kasihan mereka yang ingin mempertahankan keadilan. Mereka selalu disepelekan.

Kenaikan harga BBM, sudah bertolak belakang dari Pancasila yang merupakan landasan atau dasar negara ini. Bagaimana jadinya suatu dasar yang telah kokoh itu berusaha dirobuhkan oleh keegoisan manusia. Bangsa ini tidak akan maju. Perpecahan dan kehancuran semakin menghampiri bumi pertiwi ini. Praktek penjajahan terus hadir tanpa hentinya. Terima kasih untuk partai-partai dan sahabat-sahabat yang telah berjuang dengan gigih untuk menolak kenaikan harga BBM.

2.3. Alasan Pemerintah Menaikan Harga BBM

1. Membebani anggaran

Sejak 2011, seperlima anggaran belanja negara dihabiskan untuk subsidi energi. Tingginya subsidi tiap tahun ini [membuat pemerintah kesulitan](#) karena ruang fiskal menjadi sangat sempit.

Padahal Indonesia sebagai importir minyak sangat bergantung pada naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar. Ketika harga minyak dunia naik atau rupiah melemah, biaya untuk membeli minyak impor menggelembung, menyebabkan defisit anggaran dan meningkatnya hutang negara.

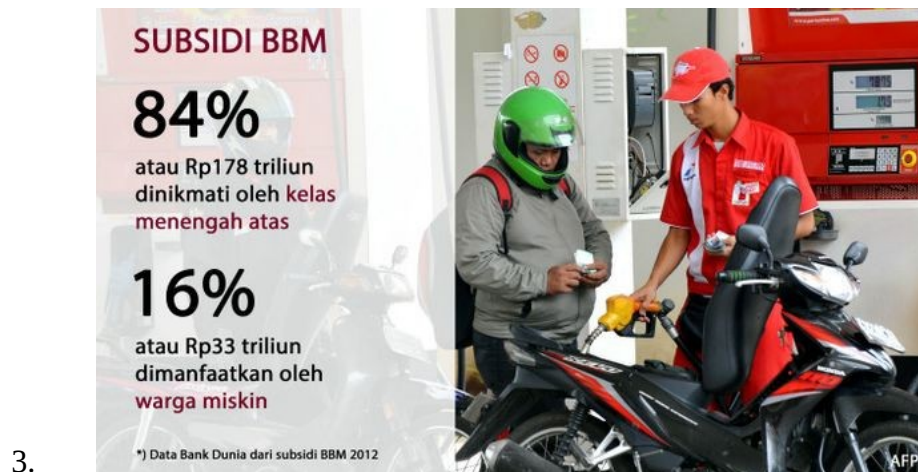
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, dalam laporannya mengatakan bahwa penurunan subsidi adalah keputusan yang bijaksana untuk mengantisipasi risiko pasar minyak global.

2. Tidak tepat sasaran



Subsidi bahan bakar minyak yang terlalu tinggi sudah lama ditentang oleh sejumlah pengamat ekonomi. Mereka beranggapan bahwa subsidi BBM menguntungkan kelas menengah atas, bukan warga miskin yang menurut Badan Pusat Statistik jumlahnya sekitar 28 juta. Para ekonom menyatakan dana subsidi lebih baik dialihkan ke

program pembangunan berkelanjutan yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini?



Menjanjikan program pembangunan

Presiden Jokowi beberapa kali sudah menyampaikan niatan untuk mengurangi subsidi energi. Dalam pidatonya di depan para pengusaha dalam KTT APEC, Senin (10/11), Jokowi mengatakan bahwa pemerintah ingin mengalihkan subsidi dari yang sifatnya konsumsi (yaitu BBM) ke program yang bersifat produktif, termasuk infrastruktur dengan membuat bendungan, pelabuhan, transportasi massal, dan pembangkit listrik.



2.4. Upaya Pemerintah untuk Mengantisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM

Bagi Masyarakat Miskin

Pemerintah telah menerbitkan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar sebagai [upaya untuk mengantisipasi](#) dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat miskin.

Direktur Institute for Ecosoc Right Sri Palupi mengatakan bahwa sejumlah kartu ini tidak boleh dibuat sebagai program kompensasi kenaikan harga BBM saja, tetapi harus menjadi bagian dari kerangka program jangka panjang untuk investasi sumber daya manusia. Jika tidak, program ini akan sama saja dengan [program bantuan langsung tunai](#) yang dibuat oleh pemerintahan SBY.

2.5. Dampak Positif dan Negatif dari Kenaikan Harga BBM

Belakangan hari ini Indonesia dihadapkan oleh sebuah permasalahan yang dapat menyita perhatian kita semua, yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM, dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, tentu saja ada masyarakat yang pro dan kontra.

Rencana kenaikan harga BBM apabila diberlakukan tentunya juga dapat menimbulkan dampak yang positif yang diharapkan semua pihak, baik kalangan dunia usaha, masyarakat sadar dan pihak pemegang kebijakan kekuatan ekonomi.

1. Dampak positif Adanya Kenaikan Harga BBM

- a. Munculnya bahan bakar dan kendaraan alternatif. Yang sudah dikenal oleh masyarakat luas adalah BBG (Bahan Bakar Gas). Harga bahan bakar juga lebih murah dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi. Selain itu, ada juga bahan bakar yang terbuat dari kelapa sawit. Tentunya bukan hal sulit untuk menciptakan bahan bakar alternatif mengingat Indonesia adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam. Selain itu, akan muncul juga berbagai kendaraan pengganti yang tidak menggunakan BBM, misalnya saja

mobil listrik, mobil yang berbahan bakar gas, dan kendaraan lainnya.

- b. Pembangunan Nasional akan lebih cepat, karena dana APBN yang awalnya digunakan untuk memberikan subsidi BBM, jika harga BBM naik, maka subsidi dicabut dan dialihkan untuk digunakan dalam pembangunan di berbagai wilayah hingga ke seluruh daerah di Indonesia.
 - c. Hematnya APBN. Jika harga BBM mengalami kenaikan, maka jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berkurang. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diminimalisir.
 - d. Mengurangi Pencemaran Udara, Jika harga BBM mengalami kenaikan, masyarakat akan mengurangi pemakaian bahan bakar. Sehingga hasil pembuangan dari bahan bakar tersebut dapat berkurang, dan akan berpengaruh pada tingkat kebersihan udara.
 - e. Dengan pengendalian subsidi BBM maka akan menurunkan defisit anggaran dan menjaga sustainabilitas fiskal, mengurangi defisit neraca perdagangan khususnya yang berasal dari migas, serta mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
 - f. Pengendalian subsidi BBM juga dapat mengendalikan kualitas belanja negara untuk jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu kita juga bisa menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang, efisiensi ekonomi nasional.
2. Dampak Negatif Adanya Kenaikan Harga BBM
- a. Harga Sembako Naik Tipis

Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel memastikan pasokan sembako lancar pasca naiknya harga BBM premium Rp 8.500/liter. Walaupun harga sembako naik, diprediksi besarnya kecil. "Saya sudah pastikan. Saya sudah rapat kemarin dengan semua distributor, sama pemerintahan daerah, memastikan pasokan lancar," katanya ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014). "Kalaupun ada kenaikan atas harga BBM ini, sembako ini naiknya satu persen. Naik itu biasa," ujarnya. Biaya yang akan naik tinggi, kata Rachmat, biasanya di sektor

transportasinya. Ia pun meminta Kementerian Perhubungan untuk melancarkan semua arus barang.

b. Tambahan Inflasi 2%

Sampai akhir tahun diperkirakan ada tambahan inflasi sekitar 2%. "Dengan BBM naik Rp 2.000 maka kami perkirakan tambahan inflasi 2014 ada di kisaran 2%," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014). Dengan demikian, lanjut Bambang, dengan baseline inflasi 5,3% maka di akhir tahun ini inflasi bisa berada di kisaran 7,3%. Imbasnya akan terasa sampai inflasi di Januari-Februari 2015, tapi tidak terlalu besar.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Kenaikan harga BBM, sudah bertolak belakang dari Pancasila yang merupakan landasan atau dasar negara ini. Bagaimana jadinya suatu dasar yang telah kokoh itu berusaha dirobuhkan oleh keegoisan manusia. Bangsa ini tidak akan maju. Hasil Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS 2010) menunjukkan bahwa pengguna BBM 65% adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27% menengah, 6% menengah ke atas, dan hanya 2% orang kaya. Dan dari total jumlah kendaraan di Indonesia yang mencapai 53,4 juta (2010), sebanyak 82% diantaranya merupakan kendaraan roda dua yang nota bene kebanyakan dimiliki oleh kelas menengah ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat. Meskipun ada yang berpendapat menaikkan harga BBM memiliki dampak positif dan negatif, akan tetapi lebih banyak dampak negatifnya yang dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah.

3.2. Saran

Indonesia seharusnya lebih mandiri dalam mengelola kekayaan negara sehingga mengurangi “kebocoran”, dan mengedepankan konstitusi untuk menunjang kesejahteraan Rakyat Indonesia, bukan dengan membuat aturan untuk menggugurkannya dan/atau mencari celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi/golongan.

Daftar Pustaka

<http://pancasila2013.weebly.com/pengertian-pancasila.html>. 18 November 2014

<http://hizbut-tahrir.or.id/2014/11/06/tolak-kenaikan-harga-bbm-tolak-liberalisasi-migas-2/>. 18 November 2014

Janu, Ary. <http://politik.kompasiana.com/2012/03/31/pancasila-vs-kenaikan-harga-bbm-450661.html>. 18 November 2014

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/11/141111_infografis_bbm_lapsus. 18 November 2014

Santi, Aneamalia. <http://aneamalia26.wordpress.com/2014/11/12/pancasila-sebagai-etika-politik-2/>. 18 November 2014

Aliya, Angga.

<http://finance.detik.com/read/2014/11/18/071028/2751082/1034/3/dampak-kenaikan-harga-bbm-inflasi-naik-sampai-negara-hemat-rp-100-triliun#bigpic>. 19 November 2014